

Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Hutan Mangrove Pancer Cengkong, Trenggalek

Imanniyar Ayu Anggraeni, *Farida Rahmawati

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang

[e-mail:manniyar@gmail.com](mailto:manniyar@gmail.com), farida.rahmawati.fe@um.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27-01-2021

Disetujui: 26-02-2021

Kata Kunci:

Pariwisata
Community Based Tourism
Pariwisata Berbasis Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Lokal

ABSTRAK

Abstrak: *Community Based Tourism* adalah salah satu konsep dari pariwisata alternatif yang mana memberikan dampak yang lebih positif dalam pengelolaannya dibanding pariwisata masal yang sifatnya konvensional. *Community Based Tourism* merupakan konsep yang dikelola atau dipraktikkan oleh suatu komunitas dan untuk komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Community Based Tourism* berdasarkan prinsip keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, sosial) pada wisata Hutan Mangrove Pancer Cengkong di Kabupaten Trenggalek. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kegiatan penyemaian bibit mangrove, penanaman mangrove massal, dan aksi bersih pantai telah dilakukan untuk menunjukkan adanya penerapan prinsip lingkungan. Perkembangan ekonomi masyarakat lokal meningkat yang disebabkan oleh terpenuhinya indikator seperti, adanya dana pengembangan komunitas dan munculnya lapangan pekerjaan baru yang berpengaruh pada timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Peningkatan kualitas hidup, tidak adanya diskriminasi *gender*, dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para anggota organisasi melalui pelatihan formal maupun informal merupakan indikasi dari penerapan prinsip sosial.

Abstract: *Community-Based Tourism* has been popular as a means of alternative tourism particularly to give better results than mass tourism which is still counted as conventional. *Community Based Tourism* is managed and owned by the community, for the community. The study was established to practice the *Community Based Tourism* through three pillars of sustainability (environmental, economic, social) in Pancer Cengkong Mangrove Forest, Trenggalek. Qualitative method is used in this study with case study approaches. Growing mangroves from containers, mass mangrove planting, and a project to clean up the tourist attraction is being done to perform environmental principle practice. The development of the local's economy increased due to indicators fulfillment such as, financially viable and created more jobs to supports local's income. The local's Quality of Live increased, no discrimination through gender, and strengthen the members of the community's skill and knowledge through some training either formal or informal indicate the practice of social principle.

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan bagian dari kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak terpisahkan dari manusia. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah [1]. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Perkembangan pariwisata di Indonesia tercatat terus tumbuh. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan pembebasan visa bagi warga negara dari 169 negara yang berkunjung ke Indonesia

untuk tujuan pariwisata dalam jangka waktu paling lama 30 hari [2].

Sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US \$16.426 pada tahun 2018. Angka tersebut meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US \$13.139. Peningkatan tersebut melanjutkan pertumbuhan jumlah devisa di tahun 2017 sebesar 17,2% dengan US \$11.206 pada tahun 2016 [3]. Peningkatan signifikan yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan adanya perhelatan Pesta Olahraga Asia atau biasa disebut Asian Games yang ke-18 di kota Jakarta dan Palembang.

Pariwisata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni *mass tourism* (pariwisata masal) dan *alternative tourism* (pariwisata alternatif). Pariwisata masal bersifat konvensional. Pengelolaan pariwisata yang bersifat konvensional menitikberatkan pada keuntungan ekonomi, peningkatan jumlah wisatawan berarti

peningkatan keuntungan ekonomi yang diterima, meskipun sering kali menimbulkan tekanan yang berat terhadap lingkungan di lokasi wisata (Tomas, 1985; Fennel, 1999) [4]. Jadi, pengelolaan pariwisata secara konvensional kurang efektif yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, tidak adanya keterlibatan pengelolaan wisata dari masyarakat setempat, serta banyaknya pengunjung dan penjual di sekitar daerah wisata yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan.

Pada era sekarang masyarakat di Indonesia sudah mulai sadar akan lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya *campaign* tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, seperti mengganti sedotan plastik dengan sedotan berbahan *stainless steel*. Banyak juga organisasi yang mengemban misi konservasi lingkungan, seperti WWF-Indonesia, Greenpeace Indonesia, lindungihutan, dsb. Pariwisata alternatif muncul sebagai *campaign* untuk pariwisata Indonesia yang lebih ramah lingkungan.

Partisipasi masyarakat penting untuk keberlangsungan suatu tempat wisata, karena masyarakat lokal lah yang lebih tahu mengenai potensi wisata yang ada di daerahnya atau bisa disebut sebagai masyarakat sadar wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata bisa disebut dengan *Community Based Tourism* (CBT). *Community Based Tourism* (CBT) atau bisa disebut pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata yang menekankan kepemilikan, pengelolaan dan keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan pariwisata [5]. Berbeda dengan ekowisata (*ecotourism*) yang fokusnya pada keramahan lingkungan.

Community Based Tourism (CBT) dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kebutuhan sosial, berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, dan juga dapat dijalankan untuk kepentingan komersil [6]. Pengadaptasian *Community Based Tourism* (CBT) yang baik akan memberikan kontribusi pada 'tiga pilar keberlanjutan'. Ketiga pilar ini merupakan konsep dasar dari *sustainability* (keberlanjutan) (yang biasa disebut TBL atau 3BL) yaitu: *environmental* (lingkungan), *economic* (ekonomi), dan *social* (sosial). *Community Based Tourism* dan *sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan) memiliki persamaan tujuan yaitu fokus pada keterlibatan masyarakat dan pembangunan. Perbedaan yang signifikan terletak pada ruang lingkupnya, *Community Based Tourism* umumnya berskala kecil yang hanya melibatkan kelembagaan lokal sebagai pengelola, sedangkan *Sustainable Tourism* ruang lingkupnya berskala global seperti PBB [7].

Ketika partisipasi masyarakat sudah terbentuk maka diperlukannya suatu wadah atau organisasi untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka. Disini lah kelembagaan lokal diperlukan, baik kelembagaan dari Pemerintah Daerah ataupun kelembagaan lokal yang terbentuk atas inisiatif masyarakat lokal sekitar objek wisata itu sendiri. Kelembagaan lokal merupakan pranata sosial tingkat lokal yang berdiri diantara individu dalam kehidupan peribadinya dengan lingkungannya, yang ternyata tidak hanya berperan mengatur tata kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat [8]. Ketika

kelembagaan pariwisata dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang baik di sektor pariwisata.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat kelembagaan lokal yang bergerak di bidang pariwisata, bernama Pokmaswas Kejung Samudra. Pokmaswas Kejung Samudra yakni pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola tempat wisata Hutan Mangrove Pancer Cengkong.

Pemilihan Pokmaswas Kejung Samudra sebagai subjek penelitian karena hal tersebut sesuai dengan maksud peneliti yang membahas keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata. Partisipasi masyarakat lokal disini merupakan salah satu indikator dari *Community Based Tourism*. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi tujuan dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan penerapan konsep *Community Based Tourism* berdasarkan indikator-indikator dari ketiga prinsip *sustainability*, yaitu: *environmental* (lingkungan), *economic* (ekonomi), dan *social* (sosial) yang melakukan studi pada tempat wisata Hutan Mangrove Pancer Cengkong yang berada di Kabupaten Trenggalek.

B. METODE PENELITIAN

Model yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [9].

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Secara ringkas, pengertian dari studi kasus yaitu melakukan penelitian secara mendalam. Perbedaan dari studi kasus dengan lainnya yakni terletak pada penekanan kedalaman analisis pada kasus tertentu yang lebih spesifik [10]. Adanya kerangka teori merupakan tahapan awal dari penelitian yang menggunakan studi kasus yang mana pada penelitian ini menggunakan teori dari *Community Based Tourism*. Unit analisis dari penelitian ini yakni sebuah kelembagaan lokal bernama Pokmaswas Kejung Samudra yang terletak di Kabupaten Trenggalek.

Peneliti bertindak sebagai pengamat yang menganalisis *why* dan *how* dari suatu kasus, sehingga peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan informan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Lokasi penelitian yang sesuai adalah kawasan objek wisata Hutan Mangrove Pancer Cengkong yang terletak di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kawasan tersebut dikelola oleh Pokmaswas Kejung Samudra.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan ialah: (1) wawancara, pemilihan informan menggunakan metode bola salju atau rantai (*snowball sampling*); (2) dokumentasi, berbentuk audiovisual. Hasil dokumentasi berupa dengan foto dan rekaman suara; dan (3) observasi, dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian dan mengamati fenomena apa saja yang terjadi.

Model analisis data yang digunakan memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data,

display data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data [11].

Pengecekan keabsahan temuan memiliki beberapa tahapan, yaitu: (1) derajat kepercayaan (*credibility*), berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan memertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti; (2) keteralihan (*transferability*), dapat dicapai ketika peneliti mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks; (3) kebergantungan (*dependability*), uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang *independent*; dan (4) kepastian (*confirmability*), pernyataan subjektif dari para informan akan berubah menjadi objektif ketika disepakati oleh beberapa orang [11].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Kelembagaan Lokal (Pokmaswas Kejung Samudra)

Hutan Mangrove Pancer Cengkong Trenggalek merupakan objek wisata yang mengukung konsep ekowisata yang terletak di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Wisatawan yang berkunjung ke area konservasi mangrove diberi kesempatan berkeliling dengan melewati jembatan kayu. Pada satu sisi, wisatawan akan menemukan Sungai Kalisongo yang membelah area konservasi mangrove. Sungai ini bermuara di Pantai Cengkong yang terletak tidak jauh dari kawasan area konservasi mangrove. Wisatawan juga bisa mengelilingi lebarnya hutan mangrove dengan naik perahu. Kebanyakan pohon bakau yang tumbuh di area konservasi mangrove masih relatif kecil sehingga belum bisa memberikan keteduhan bagi wisatawan yang berkeliling tetapi di setiap sudut jembatan disediakan gazebo untuk wisatawan berteduh sambil beristirahat.



Gambar 1. Hutan Mangrove Pancer Cengkong

Pengelolaan Hutan Mangrove Pancer Cengkong berada dibawah Pokmaswas Kejung Samudra. Pokmaswas Kejung Samudra adalah kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat pantai didalam pembangunan perikanan sehingga terwujud masyarakat pantai yang sejahtera. Pokmaswas Kejung Samudra juga berkonsentrasi di dalam mengelola lingkungan mangrove yang ada di sekitar Pantai Cengkong. Dari 15 anggota yang tergabung dalam Pokmaswas ini, 2 dari luar Desa Karanggandu sisanya adalah masyarakat asli Desa Karanggandu. Dalam pengelolaan hutan mangrove, Pokmaswas Kejung

Samudra berkerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek selaku pembina.

2. Penerapan Prinsip Lingkungan (Environmental)

Indikator yang digunakan pada penerapan prinsip lingkungan ialah: (1) pengembangan *carrying capacity area*; (2) terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan; dan (3) adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi.

Carrying capacity adalah jumlah maksimum individu yang dapat didukung atau dilayani oleh sumber daya yang ada di dalam suatu ekosistem [12]. Jadi untuk konteks dalam penelitian ini, *carrying capacity area* adalah suatu area/tempat yang mempunyai kemampuan menampung semua pengunjung tempat wisata (populasi). Pembatasan pengunjung merupakan salah satu cara mewujudkan *carrying capacity area*. Sistem pembatasan jumlah pengunjung diterapkan di TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) khususnya untuk pendakian pada Gunung Semeru. Pendaki yang diizinkan melakukan pendakian hanya 500 orang per harinya. Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) juga melakukan penutupan kegiatan pendakian Gunung Semeru dengan maksud untuk pemulihan/revitalisasi ekosistem di sepanjang jalur pendakian dalam upaya menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Pembatasan jumlah pengunjung seperti yang diterapkan di Gunung Semeru belum diterapkan di hutan mangrove, meskipun penerapan program pembatasan jumlah pengunjung juga sudah dihimbau oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek selaku pembina.

Pokmaswas menyediakan tempat sampah di beberapa spot yang mudah dijangkau oleh wisatawan. Terdapat 5 spot tempat sampah yang diletakkan di gazebo sepanjang jembatan mangrove dan 2 tempat sampah yang tersebar di luar jembatan mangrove. Pokmaswas juga memasang papan himbauan agar wisatawan membuang sampah pada tempatnya. Banyaknya timbunan sampah tidak hanya disebabkan oleh wisatawan saja, melainkan dari faktor alam. Lokasi objek wisata dekat dengan pemukiman warga, ketika banjir datang sampah-sampah dari area pemukiman tersebut juga akan ikut naik sampai ke area objek wisata. Penanganan masalah sampah dengan cara memilah sampah basah dan kering kemudian dijadikan kompos [13]. Mengenai pembuangan sampah yang dilakukan di objek wisata Hutan Mangrove pengelola masih menggunakan metode lama yakni dengan cara dibakar, hal ini sudah jelas sekali bukan metode yang ramah lingkungan.

Keperdulian tentang pentingnya konservasi di objek wisata hutan mangrove sudah baik. Setelah sekian lama melakukan konservasi hutan mangrove dan reboisasi di kawasan pantai Cengkong, kini para anggota Pokmaswas sudah piawai dalam melakukan penyemai. Pertama, menyemai bibit mangrove dan kedua, menyemai cemara udang. Selain menyemai bibit mangrove dan cemara udang, pokmaswas juga membudidayakan kepiting untuk dijual ke wisatawan ataupun pemilik restoran. Penanaman mangrove merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Pokmaswas. Pihak yang terlibat bisa dari semua kalangan, seperti masyarakat sekitar objek wisata,

masyarakat luar Desa Karanggandu, dan bahkan dari kalangan pelajar. Kegiatan penanaman seperti ini tidak dipungut biaya sama sekali. “Bersih Pantai” merupakan agenda lain dari Pokmas Kejung Samudra. Judul dari kegiatannya memang bersih pantai, akan tetapi kegiatan dilakukan di Pantai Cengkong dan kawasan sekitarnya yaitu hutan mangrove. Mengingat kedua spot tersebut masih satu kawasan. Agenda tersebut biasa terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan Pokmaswas Kejung Samudra sadar akan pentingnya konservasi. Lingkup kegiatan yang tidak hanya dilakukan intra organisasi melainkan melibatkan masyarakat umum mengindikasikan mereka ingin menularkan budaya konservasi.



Gambar 2. Proses Pembibitan Mangrove

3. Penerapan Prinsip Ekonomi (*Economy*)

Berikut merupakan indikator dalam penerapan prinsip ekonomi, antara lain: (1) timbulnya dana untuk pengembangan komunitas; (2) terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata; dan (3) timbulnya pendapatan masyarakat lokal.

Dana pengembangan komunitas berfungsi sebagai operasional kelompok. Dana kelompok digunakan untuk kebutuhan kelompok sesuai kesepakatan kelompok (Suansri, 2013) [14]. Pada objek wisata hutan mangrove dana awal untuk pendirian komunitas dibiayai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dan pengumpulan secara sukarela dari para anggota. Dana juga didapat melalui penjualan bibit mangrove, penjualan tiket masuk, biaya parkir kendaraan, dan jasa penyewaan toilet umum. Keuntungan yang didapat dijadikan sebagai dana operasional kelompok. Alokasi dari dana operasional kelompok tersebut untuk menggaji para anggota, perbaikan, pendanaan suatu kegiatan, dan juga pembayaran pajak kepada Dispenda Kabupaten Trenggalek sebanyak 10%-15% dari pendapatan setiap bulannya.

Sasaran utama dari konsep CBT adalah pengembangan kepariwisataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Nurhayati, 2012) dalam [15]. Keanggotaan Pokmaswas Kejung Samudra terbuka untuk siapa saja, baik masyarakat Desa Karanggandu itu sendiri maupun dari daerah lain. Ketika masyarakat bergabung menjadi anggota Pokmaswas, secara otomatis akan terlibat dalam pengelolaan objek wisata hutan mangrove. Masyarakat yang awalnya hanya seorang pengangguran mendapatkan penghasilan lain sebagai anggota Pokmaswas. Tidak terkecuali dengan para pedagang yang ada di dalam lokasi objek wisata hutan mangrove yang mana juga anggota dari Pokmaswas. Partisipasi terbanyak dalam aktivitas wisata di dalam objek wisata hutan mangrove yakni warung makanan sebanyak 12 (dua belas) unit. Hal ini serupa dengan dampak yang juga dirasakan oleh masyarakat lokal sekitar Candi Borobudur yang dahulu mayoritas bekerja sebagai

petani dan buruh tani kini banyak yang beralih untuk berjualan di sekitar kawasan destinasi wisata [16]. Jadi, pariwisata dapat memberikan dampak yang positif bagi ekonomi masyarakat lokal.



Gambar 3. Warung di dalam Objek Wisata

Dengan munculnya lapangan pekerjaan baru, ini secara langsung berhubungan dengan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Masyarakat diuntungkan dari berdagang. Penghasilan yang diperoleh dari berdagang tidak menentu, tetapi masih dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika wisatawan sedang ramai yang ditandai pada hari libur/*weekend*, penghasilan akan meningkat.

4. Penerapan Prinsip Sosial (*Social*)

Indikator dalam penerapan prinsip sosial ada 4, yaitu: (1) terdapat peningkatan kualitas hidup; (2) adanya peningkatan kebanggaan komunitas; (3) pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua; dan (4) terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.

Schalock dan Siperstain menyatakan jika pengukuran Kualitas Hidup (*Quality of Live/QOL*) dalam pengembangan pariwisata merupakan pengalaman subyektif yang sangat tergantung pada persepsi dan perasaan individu; serta pendapat Tylor dan Bogdan yang menyatakan bahwa QOL paling ideal dipelajari dari perspektif individu (Vogt, 2000) [17]. Individu dalam penelitian ini merujuk pada ketua dan anggota komunitas. Pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan setiap tahunnya, salah satunya ditandai dengan munculnya banyak objek wisata baru yang secara otomatis menjadi pesaing bagi objek wisata hutan mangrove. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan di objek wisata hutan mangrove yang cukup signifikan. Tidak hanya banyaknya wisata baru yang bermunculan, masalah fasilitas juga menjadi penyebab menurunnya jumlah wisatawan, antara lain: terdapat beberapa spot di jembatan yang sudah bolong dan kayu pegangan yang kurang aman. Penurunan jumlah wisatawan di objek wisata hutan mangrove masih direspon secara positif oleh anggota komunitas, karena ketika hari libur atau *weekend* tiba masih bisa dibilang ramai yang mana mereka masih mendapat keuntungan yang dibilang cukup.

Kebanggaan komunitas berdasarkan teori motivasi tuan rumah, masyarakat membutuhkan pengakuan atas karya mereka, kreativitas mereka, dan mereka mengharapkan pula wisatawan dapat memberikan pengakuan pula atas produk yang mereka hasilkan (Hermantoro, 2014) [18]. Seiring berkembangnya wisata mangrove, banyak wisatawan yang mulai berdatangan. Para Informan banyak memberikan respon yang positif seperti harga tiket yang murah, mangrovenya terawat dengan baik dan tempat wisata yang bisa dijadikan

sebagai sarana edukasi khususnya bagi pelajar dan anak-anak. Jadi, pihak Pokmaswas merasa bangga karena mendapatkan pengakuan yang positif dan juga tujuan dari wisata hutan mangrove sudah tersampaikan kepada wisatawan.

Ideologi, tipe, dan skala pariwisata sangat menentukan adanya pembagian pekerjaan yang digelar oleh laki-laki maupun perempuan. Perbedaan pembagian kerja tersebut diterima oleh masyarakat (Lion & Kindon, 1997) [19]. Dalam keanggotaan Pokmaswas Kejung Samudra terbagi menjadi dua bagian yakni laki-laki dan perempuan terlepas anggota tersebut masuk dalam kategori generasi muda atau tua. Secara garis besar, yang membedakan tugas dari keduanya yakni pembagian tugas. Tugas dari anggota laki-laki berfokus pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove, sedangkan tugas dari anggota perempuan berfokus pada pengelolaan hasil dari mangrove itu sendiri. Hasil olahan dari mangrove tersebut berupa tepung dan juga sirup. Ide adanya pengolahan mangrove menjadi sirup ini dicanangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek yang melakukan studi di Situbondo pada tahun 2010. Produk sirup ini sifatnya tidak dipasarkan secara luas, hanya dibuat berdasarkan pesanan atau untuk bahan praktik.

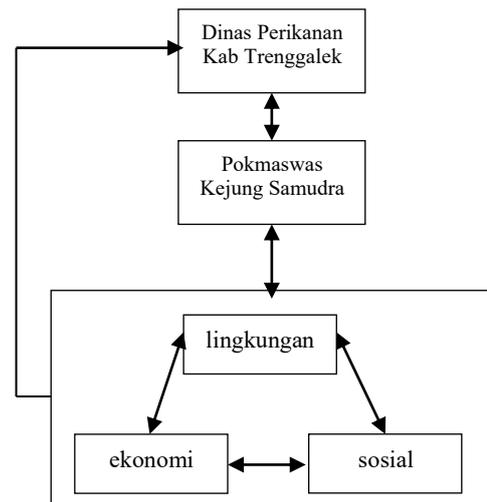
Salah satu bentuk penguatan organisasi komunitas yakni dengan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, SDM pariwisata pada intinya dapat digolongkan berdasarkan institusinya yaitu institusi pemerintah, institusi swasta dan masyarakat [14]. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan SDM adalah dengan melakukan sosialisasi, diskusi, maupun pembinaan. Pihak Pokmaswas setidaknya melakukan pembinaan sebanyak 12 kali dalam setahun yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi. Pelatihan ini kebanyakan membahas mengenai pembibitan dan budidaya mangrove. Sedangkan dari Disparbud Kabupaten Trenggalek melakukan sosialisasi agar tetap sesuai dengan sapa pesona dan sadar wisata. Jadi, baik pelatihan maupun sekedar diskusi sangat baik bagi penguatan organisasi itu sendiri. Tidak hanya dapat memberikan solusi atas isu-isu yang sedang terjadi pada dalam komunitas tersebut tetapi juga para anggota komunitas lebih terlatih lagi. Tetapi terlepas dari itu semua kembali ke anggota dari komunitas itu sendiri, praktik atau hanya sebatas diskusi.

5. Model Community Based Tourism sebagai Output Disain Kelambagaan

Penanaman mangrove di area Pantai Cengkrong merupakan inisiatif dari warga Desa Karanggandu. Inisiatif warga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti: Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat. Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek selanjutnya membentuk kelompok pengelola yang dikenal sekarang sebagai Pokmaswas Kejung Samudra. Penanaman awal mangrove dilakukan melalui program yang dinamakan COFISH. Program COFISH merupakan program pemberdayaan masyarakat pantai dan sumberdaya perikanan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Inisiatif warga, serta dukungan dari 3 (tiga) lembaga tersebut mengindikasikan adanya sinergi yang baik antara *stakeholder* kepariwisataan di Hutan Mangrove Trenggalek. Kawasan pariwisata memerlukan upaya-upaya yang terkoordinir dalam hal perencanaan,

pengembangan maupun pemasarannya. Koordinasi yang baik dapat dicapai melalui pembentukan *Destination Management Organization (DMO)* atau bisa disebut dengan Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata. DMO dibagi dalam 3 (tiga) bagian yakni tujuan, aktifitas atau kegiatan dan struktur DMO. Tujuan diartikan sebagai sasaran atau target yang akan dicapai suatu organisasi dalam menjalankan suatu DMO. Sasaran ini dituangkan dalam bentuk tujuan (*goals*) yang hendak dicapai pada periode tertentu. Aktifitas dapat dimaknai sebagai segala usaha, program atau kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan DMO. Umumnya, DMO bidang pariwisata senantiasa menitikberatkan pada pentingnya mendorong masyarakat mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata serta pelestarian sumber-sumber pariwisata yang dijadikan sebagai daya tarik wisata (Longjit dan Pearce, 2013) [20]. Dari uraian di atas, model CBT dalam Hutan Mangrove Trenggalek dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Community Based Tourism sebagai Disain Kelembagaan

D. SIMPULAN DAN SARAN

Prinsip yang sudah diterapkan dengan baik yaitu prinsip ekonomi dan sosial. Penerapan prinsip ekonomi ditandai dengan adanya dana untuk pengembangan komunitas ini dialokasikan untuk kepentingan para anggota, pembangunan fasilitas, biaya perbaikan, pembayaran pajak hiburan dan pembiayaan konservasi. Banyaknya warung yang ada di dalam objek wisata menandakan timbulnya pekerjaan di bidang pariwisata. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru, secara otomatis ini berpengaruh pada timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Penerapan prinsip sosial diindikasikan dengan masyarakat lokal terbantu dalam finansial yang mana meningkatkan kualitas hidup mereka, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, respon positif para wisatawan menimbulkan perasaan bangga bagi Pokmaswas Kejung Samudra. Di Pokmaswas Kejung Samudra, kesetaraan *gender* sangat diperhatikan yang dapat dilihat melalui anggotanya yang berasal dari berbagai kalangan. Pembagian tugas dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mekanisme penguatan organisasi di Pokmaswas Kejung Samudra dengan cara memaksimalkan kinerja SDM yang ada.

Sosialisasi, diskusi, maupun pembinaan merupakan upaya pengembangan SDM yang dilakukan pihak Pokmaswas agar anggotanya tidak tertinggal dalam hal pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*).

Indikator yang terpenuhi dalam penerapan prinsip lingkungan adalah konservasi lingkungan. Objek wisata hutan mangrove sudah baik dalam hal konservasi lingkungan karena mampu melakukan penyemaian bibit mangrove, penyemaian cemara udang, dan juga membudidayakan biota laut lain seperti kepiting secara rutin. Tidak terpenuhinya indikator lain seperti sistem pembuangan sampah dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan sampah yang baik, sedangkan tidak adanya pengembangan *carrying capacity area* disebabkan Pokmaswas masih mementingkan kepuasan pengunjung.

Artikel ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (1) perlu diberlakukannya pembatasan jumlah pengunjung sebagai bentuk pengembangan *carrying capacity area*; (2) mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk dan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan; (3) Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan para anggota dalam berwirausaha agar dapat membuat produk-produk inovatif yang mempunyai daya jual, atau bahkan dapat menjadi ciri khas unik dari wisata Hutan Mangrove Trenggalek; dan (4) membuat beberapa inovasi atau *upgrading* hutan mangrove dengan cara membangun beberapa spot foto yang menarik dan kekinian mengingat para wisatawan sekarang suka mengunggah foto mereka ke sosial media.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farida Rahmawati, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Kepariwisata, 2009.
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Bebas Visa Kunjungan, 2016.
- [3] Badan Pusat Statistik, 2019.
- [4] Soetopo, *Komunika - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Google Buku*, 2007.
- [5] Suriya, K., "Impact of Community-based Tourism in a Village Economy in Thailand: An analysis with VCGE model", *Journal of Economic Literature*, 2010.
- [6] Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., dan Paddon, M., *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual*, 2010.
- [7] Dangi, T. B., dan Jamal, T., "An integrated approach to "sustainable community-based tourism"", *Sustainability*, Vol 8, No.5, h. 1-32, Mei 2016.
- [8] Wasistiono, S., *Prospek Pengembangan Desa*, CV Bandung Fokusmedia, Bandung, 2006.
- [9] Moleong, L. J., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Revisi), PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- [10] Rahardjo, M., *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus*, UIN Malang, 2010.
- [11] Miles, M. B., dan Huberman, A. M., *ANALISIS DATA KUALITATIF Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Indonesia), UI: Press, Jakarta, 1992.
- [12] Simangunsong, H., *Apa itu Carrying Capacity?*,

Kompasiana, 2015.

- [13] Nugroho, D. S., "Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata", *Jurnal Pariwisata*, Vol 5, No. 1, h. 42-55, April 2018.
- [14] Yachya, A. N., Wilopo, dan Mawardi, M. K., "PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS CBT (*COMMUNITY BASED TOURISM*) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol 39, No. 2, h. 107-116. Oktober 2016.
- [15] Arifin, A. P. R., "PENDEKATAN COMMUNITY BASED TOURISM DALAM MEMBINA HUBUNGAN KOMUNITAS DI KAWASAN KOTA TUA JAKARTA". *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol 16, No. 01, h. 111-130. Mei 2017.
- [16] Hamzah, F., Hermawan, H., dan Wigati, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata*, Vol 5, No. 3, h. 195-202. September 2018.
- [17] Nurhidayati, S. E., dan Fandeli, C., "Penerapan Prinsip *Community Based Tourism* (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur". *Jejaring Administrasi Publik*, Vol IV, No. 1, h. 36-46, Januari-Juni 2012.
- [18] Hermawan, H., "PENGARUH DAYA TARIK WISATA, KESELAMATAN, DAN SARANA WISATA TERHADAP KEPUASAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS WISATAWAN: Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran", *Jurnal Media Wisata*, Vol 15, No. 1, h. 562-577, Mei 2017.
- [19] Puspasari, D. A., dan Sariffuddin, "PERAN GENDER DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA WISATA COLO KABUPATEN KUDUS", *Jurnal Tata Loka*, Vol. 17, No. 4, h. 223-230, November 2015.
- [20] Junaid, I., dan Salim, M. A., "Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta", *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, Vol 1, No. 1, h. 1-7, 2019.